

SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL PASCA PERUBAHAN TATA RUANG KAWASAN SURAMADU

Naskah diterima Tgl. 8 Agustus 2010, Naskah disetujui Tgl. 20 Oktober 2010

Tri Weda Rahardjo*)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) Kondisi tata ruang sebelum dan sesudah pembangunan Jembatan Suramadu; (b) Kebijakan pemberdayaan sektor informal di wilayah Jembatan Suramadu; (c) Perkembangan sektor informal di wilayah Jembatan Suramadu; (d) Kondisi sosialisasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal di kawasan Jembatan Suramadu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Tidak ada perubahan signifikan tata ruang di Surabaya karena di area ini telah dipersiapkan untuk pembangunan Jembatan Suramadu. Bangkalan melakukan perubahan tata ruang yang signifikan karena adanya perubahan peruntukkan. Sampang, Pamekasan dan Sumenep tidak secara langsung berkaitan dengan pembangunan jembatan ini sehingga perubahannya tidak signifikan; (b) Kebijakan pemberdayaan sektor informalnya di semua wilayah baik Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep telah mengantisipasi pembangunan Jembatan Suramadu; (c) Perkembangan sektor informal di wilayah Suramadu, semuanya ingin meningkatkan usahanya dengan harapan disediakan fasilitas usaha yang memadai di area ini; (d) Kondisi sosialisasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal telah menjadi kewenangan BPWS, sehingga baik Surabaya dan Bangkalan yang beruila di tapak pembangunan Jembatan Suramadu tidak memiliki otoritas untuk mengembangkannya.

Kata Kunci: Sosialisasi, sektor informal, perubahan tata ruang

ABSTRACT

This research purposes are to understand : (a) Condition of spatial area, before and after development of Suramadu Bridge; (b) Informal sector empowerment policies of Suramadu Bridge Area; (c) The Progress of informal sector on Suramadu area; and (d) The Dissemination condition of informal sector structuring and developing policies on the area of Suramadu Bridge.

The research results show that (a) (a) Before and after development of Suramadu Bridge, the spatial on Surabaya is no significant change, because its area has been prepared for developing of Suramadu Bridge. Bangkalan has significant change, especially on District of Labang. Sampang, Pamekasan and Sumenep are no significant change because not directly related to this development; (b) Informal sector empowerment policies of Suramadu Bridge Area, all regency area have anticipated for this policies by issued programs and activities related to; (c) The Progress of

*) Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

informal sector on Suramadu area, they all want to improve their business by availability to facilities related to; and (d) The Dissemination condition of informal sector structuring and developing policies on the area of Suramadu Bridge, that Suramadu Bridge Site become authority of Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS). so Surabaya Municipality and Bangkalan Regency have no authority to manage the informal sectors. And until this research BPWS have no programs and activities for them.

Keywords : socialization, informal sector, spatial changes

PENDAHULUAN

Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, yang menjadikannya salah satu *landmark* dan ikon Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur. Jembatan Suramadu memiliki panjang 5.438 m dan menghubungkan pulau Jawa (di Surabaya) dan pulau Madura (di Bangkalan). Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan Suramadu yang terdiri dari 3 bagian yaitu *causeway*, *approach bridge* dan *main bridge* diperkirakan biaya pembangunan jembatan ini adalah Rp. 4,5 *trilyun*.

Pembangunan jembatan ini akan berpengaruh terhadap tata ruang pada kedua area yang dihubungkan. Hal penting di dalam penataan tata ruang adalah netralitas peran mediasi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan dan memperbaiki konflik-konflik kelompok dalam masyarakat¹ sehubungan dengan kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang akan disusun ke dalam rencana tata ruang. Setiap perubahan tata ruang ini,

akan memiliki dampak ke berbagai pihak, baik berupa dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, sehingga dibutuhkan perhitungan dan penanganan yang matang didalam memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan setiap melakukan kebijakan rencana perubahan tata ruang.

Pembangunan Jembatan Suramadu yang pada prinsipnya bertujuan meningkatkan aksesibilitas pulau Madura. Sebuah gerbang yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan bisa memicu perubahan-perubahan yang signifikan pada sistem pengembangan wilayah Madura.

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Gerbangkertosusila yang dibuat tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada nantinya, dan saat ini sedang dilaksanakan review. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan penyusunan Review Kawasan GKS-Madura, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Labang, RTRK/RTBL Tambak Wedi, Sukolilo Barat (sisi Surabaya), dan Kecamatan Bangkalan, Soca, Blega,

¹ Baca Anderson dan Hughes (1994: 104), terdapat 7 peran umum dasar pemerintah diantaranya adalah: ...Menyelesaikan dan memperbaiki konflik-konflik kelompok dalam masyarakat; ... Perindungan sumber-sumberdaya alam.

Petemon, Tanah Merah, Kamal (sisi Bangkalan) serta menyusun Amdal Kawasan Kaki Jembatan Suramadu.

Melalui *review* tersebut diharapkan memberikan alternatif untuk pengembangan Gerbangkertosusila dengan pemekaran wilayah ke arah Madura, sehingga menjadi Gema Kertosusila.

Demikian pula bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan Suramadu, perubahan tata ruang ini, salah satunya akan berpengaruh pula terhadap perubahan pola pekerjaan, khususnya bagi mereka yang bekerja pada sektor informal, baik yang berubah karena pekerjaan lamanya tergusur, maupun berubah karena adanya peluang pekerjaan baru yang dianggap lebih menguntungkan.

Agar perubahan pola pekerjaan sektor informal masyarakat sekitar Kawasan Suramadu dapat tertata dengan baik, serta mendukung perkembangan kondisi sosial dan ekonomi mereka, maka diperlukan kebijakan yang mendukung pula. Untuk memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dirancang dengan memahami berbagai unsur-unsur komunikasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Lasswell persoalan komunikasi menyangkut lima unsur yakni: Sumber, Isi Pesan, Media, Penerima Pesan (Khalayak), dan Dampak. (Senjaya, 1996).

Tujuan penelitian ini adalah :

- Mengetahui kondisi tata ruang daerah sebelum dan sesudah pembangunan Jembatan Suramadu.
- Mengetahui kebijakan pemberdayaan sektor informal daerah wilayah

Suramadu.

- Mengetahui perkembangan sektor informal pada kawasan Jembatan Suramadu.

- Mengetahui kondisi sosialisasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal di kawasan Jembatan Suramadu.

Untuk membatasi lingkupnya, dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan proses pola perubahan pekerjaan sektor informal masyarakat kawasan Suramadu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan strategi komunikasi guna mengatur dan memperkuat posisi pola pekerjaan informal mereka.

Dari penelitian ini diharapkan dapat tersusun Strategi Komunikasi untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penataan dan pengembangan sektor informal masyarakat di sekitar Kawasan Suramadu.

Dengan tersusunnya Strategi komunikasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal masyarakat di sekitar Kawasan Suramadu ini, diharapkan sosialisasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang menggunakan metode untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini adalah Tapak Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), dengan sumber informasi:

- a. Masyarakat yang bekerja di sektor informal sekitar dua sisi Tapak Jembatan Suramadu, baik di sisi Surabaya maupun sisi Bangkalan.
- b. Institusi yang terkait yang meliputi:
 - Badan Perencanaan Pembangunan, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep;
 - Dinas Koperasi, UMKM, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam kepada baik instansi maupun masyarakat;
- Observasi langsung, yaitu teknik yang digunakan untuk mengkonfirmasi data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jalan mengamati atau melihat langsung ke obyek yang menjadi sasaran.

Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan analisis kualitatif yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan membuat diskripsi dan

analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi langsung.

HASIL PENELITIAN

1. Kondisi tata ruang daerah dalam wilayah Suramadu dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya, tidak mengalami perubahan yang berarti karena tapak Jembatan Suramadu memang telah dipersiapkan ketika perencanaan pembangunan jembatan dibuat, sehingga tidak ada masalah yang berarti dalam pemanfaatan lahan untuk jembatan tersebut. Struktur Ruang Kota Surabaya meliputi ruang darat dan laut yang direncanakan berdasarkan kondisi dan potensi pemanfaatan lahan, fungsi kegiatan perkembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan dan diarahkan secara merata dan terstruktur pada seluruh wilayah kota.

Rencana struktur pemanfaatan ruang pada wilayah darat dan laut tersusun atas wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah darat, zona pengembangan wilayah laut, sistem transportasi, sistem pematuan dan sistem utilitas kota.

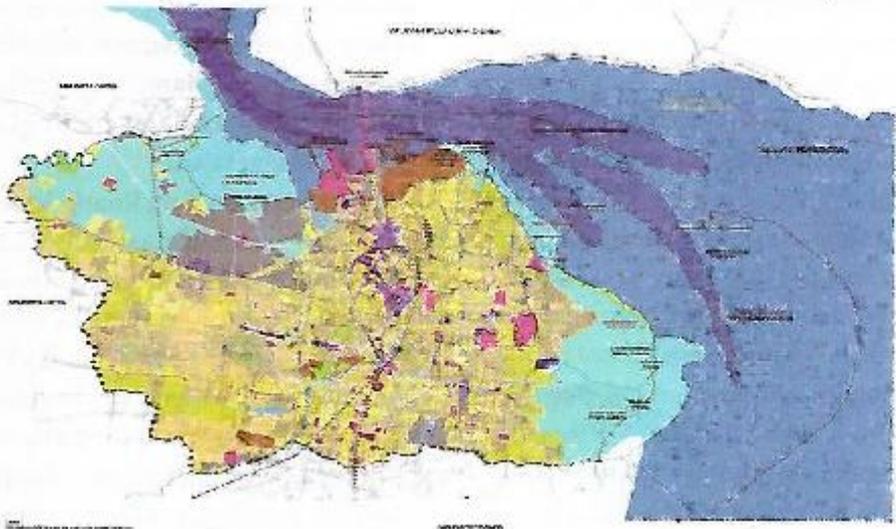
Pematangan pemikiran pembangunan Jembatan Suramadu telah dilakukan lebih dua puluh tahun yang lalu, sehingga pembangunan jembatan tersebut

sejak lama tidak berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya.

Jembatan Suramadu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2015, berada pada Unit Pengembangan (UP) III Tambak Wedi, dengan fungsi utama Permukiman, Perdagangan Jasa,

Rekreasi, dan Konservasi. Disamping itu wilayah Tapak Jembatan Suramadu ini juga berada pada Zona Wilayah Laut III Tambak Wedi- Kenjeran, dengan fungsi utama Wisata bahari, areal penangkapan dan budidaya Perikanan dan alur pelayaran kapal nelayan.

Peta 1 Gambar Penggunaan Lahan dan Ruang Laut Kota Surabaya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya 2015

- b. Berbeda dengan Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan tata ruang yang berarti. Perkembangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bangkalan sebelum pembangunan Jembatan Suramadu tidak bisa mengikuti perkembangan kota-kota di Jawa, karena adanya hambatan di bidang transportasi, perpindahan arus barang dan jasa tidak bisa berkembang pesat karena satu-satunya sarana transportasi hanya melalui jasa penyebrangan Ferry yang setiap hari semakin padat.

Perkembangan perkotaan hanya berpusat pada kota-kota yang merupakan ibukota kecamatan dan yang dilalui jalan arteri primer mulai dari Kota Kamal, Bangkalan, Burneh, Tanah Merah, Blega dan Sampang. Lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh lahan persawahan, baik tadah hujan, irigasi teknis, tegalan, maupun lahan perkebunan.

Sesuai dengan konsep dan strategi penataan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan 2009-2028 (belum di-

PERDA-kan), maka sistem perwilayahan di Kabupaten Bangkalan dibagi menjadi 6 (enam) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yang masing-masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Kecamatan Labang yang merupakan area tapak Jembatan Suramadu di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan 1998/99-2008/2009 merupakan Satuan Kawasan Lindung dan Budidaya.

Pada RTRW 2009-2028 merupakan Pusat Pertumbuhan bagi Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II, dengan fungsi industri, pergudangan, skala regional, perdagangan skala regional dan lokal, pertanian, peternakan, dan jasa transportasi darat.

Dengan demikian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2028 di atas, maka Kecamatan Labang yang merupakan tempat tapak Jembatan Suramadu sisi Madura masuk dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II, dan berada pada Rencana Struktur Ruang (RTR) sistem perwilayahan yang meliputi Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Kwanyar. Kecamatan Labang sesuai Rencana Kawasan Strategis juga berada pada Kawasan Strategis Ekonomi, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, di samping Kawasan Pelabuhan Khusus Socah dan Kawasan Internasional Hub Klampis.

Setelah pembangunan Jembatan Suramadu, arah perkembangan kota mulai bergeser mendekati Kawasan Kaki Suramadu dan area penyangganya seperti Kecamatan Labang, Tragah dan Burneh. Keberadaan Jembatan Suramadu menyebabkan Pelabuhan Kamal berkurang volume penyeberang yang melaluinya sehingga mengakibatkan perkembangan Kota Kamal dan aksesnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, namun sebaliknya pada akses Kota Bangkalan Jembatan Suramadu mengalami peningkatan volume sangat tajam.

Perencanaan Tata Ruang kedepan telah mengakomodasi keberadaan Jembatan Suramadu yang ditandai dengan rencana-rencana pembangunan yang mendukung pengembangan Kawasan Suramadu seperti rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Modung, Pelabuhan Khusus di Socah, dan Terminal Tipe A di Akses Suramadu.

- c. Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembangunan Jembatan Suramadu, sehingga, RTRW yang disusun tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga kalau ada revisi terhadap RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2007-2027, semata-mata karena menyesuaikan dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Sebelum pembangunan Jembatan Suramadu Kabupaten Sampang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2007 - 2027; dimana untuk mendorong pemerataan pembangunan dalam struktur tata ruang tersebut ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Beberapa wilayah dengan satu wilayah sebagai pusat pelayanannya, dan diberi kelengkapan fasilitas penunjang sosial ekonomi dalam skala pelayanan sub-regional, sementara wilayah lainnya sebagai wilayah pendukung. Wilayah pusat ini harus memiliki aksesibilitas yang tinggi pada wilayah sekitarnya.

Sesuai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sampang, setelah adanya perkembangan wilayah yang saat menjadi 14 kecamatan dengan terbentuknya 2 kecamatan pada tahun 2003 yaitu Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Karangpenang, maka dengan dasar pertimbangan bahwa jumlah kecamatan yang dimiliki Kabupaten Sampang cukup banyak, serta kondisi geografis dan topografi wilayah yang berbeda-beda, perlu adanya pembagian sub satuan wilayah pengembangan (SSWP) untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Sesuai dengan kebijakan Kabupaten Sampang dalam RTRW sebelumnya yang membagi wilayahnya dalam 4 SSWP, maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2007-2027 pembagian wilayah pengembangan dari 14 kecamatan akan

tetap dibagi kedalam 4 SSWP yaitu SSWP Wilayah Selatan, SSWP Wilayah Barat, SSWP Wilayah Utara, dan SSWP Wilayah Timur.

- d. Kabupaten Pamekasan juga bukan merupakan wilayah yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan Jembatan Suramadu, sehingga walaupun dilakukan revisi RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2007-2027 juga karena penyesuaian terhadap UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan dalam mengantisipasi pasca pembangunan Jembatan Suramadu masih relatif sama yaitu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 - 2027.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Batas SSWP didasarkan pada batas administrasi wilayah, dimana setiap SSWP terdiri dari satu atau beberapa kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Masing-masing SSWP direncanakan mempunyai pusat perwilayahan (Pusat SSWP) dan struktur kegiatan utama. Pusat SSWP adalah perkotaan dengan orde III A. Fungsi SSWP mendefinisikan fungsi pusat pelayanan, sedangkan struktur kegiatan utama adalah jenis kegiatan utama yang akan direncanakan dikembangkan di masing-masing SSWP.

Setiap Pusat SSWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta keterkaitan kegiatan dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar SSWP. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan perkotaan satu dengan perkotaan lainnya, dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan di setiap SSWP.

Tiga Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Pamekasan ini meliputi:

- Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) I Selatan meliputi: Kecamatan-Kecamatan Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Larangan, Galis dan Pademawu.
 - Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II Tengah meliputi: Kecamatan-kecamatan Pakong, Kadur, Palengaan, dan Pegantenan.
 - Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III Utara meliputi Kecamatan-kecamatan: Waru, Batumarmar, dan Pasean
- e. Kabupaten Sumenep yang merupakan wilayah Madura yang paling timur, kedepan diprediksi keberadaan jembatan Suramadu akan berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Sumenep. Sama halnya dua kabupaten yang lain (Sampang dan Pamekasan) bahwa revisi RTRW dan Perencanaan Umum Matra laut Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2026 menyesuaikan

dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Keberadaan Kabupaten Sumenep yang berada di dalam Pulau Madura ini akan memberikan implikasi terhadap perkembangan dan pembangunan di Pulau Madura. Hal ini terkait dengan potensi yang ada, selain dari sektor pariwisata juga perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu yang cepat, Kabupaten Sumenep beserta dengan jajaran pulau-pulau yang masuk dalam wilayahnya dapat berkembang. Letak Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura dan terbagi menjadi wilayah daratan dan lautan. Memiliki ± 126 pulau yang tersebar di sekelilingnya, diantaranya 48 pulau sudah berpenghuni. Potensi yang menonjol adalah kelautan dengan diimbangi dengan potensi daratan yang memiliki peninggalan-peninggalan pra sejarah.

Dengan terselesaikannya pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan P.Jawa dan Madura, diduga akan memberikan dampak secara ekonomi terhadap P. Madura secara keseluruhan. Berdasarkan hasil proyeksi pertumbuhan perekonomian di P. Madura menunjukkan bahwa pada tahun 2013 perekonomian P. Madura akan mencapai puncak dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 16,27 % yang akhirnya akan merubah struktur ekonomi, dimana peran sektor modern (industri, listrik air dan bangunan-konstruksi) meningkat

lebih dari 2 kali lipat, yakni dari 5,52 % pada tahun 2000 menjadi 12,57 % atau 11,37 % pada tahun 2013.

Perkembangan yang sangat cepat ini akan berdampak pada Kabupaten Sumenep sebagai wilayah Madura yang cukup potensial dan menjadi bagian dari P. Madura. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka penataan ruang sebagai bagian dari kegiatan pembangunan perlu disinergikan dan dikoordinasikan antar 4 (empat) wilayah pemerintah kabupaten di Madura, termasuk Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini, Madura akan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi bukan lagi hanya sebagai satu kesatuan geografis. Ide dasar inilah yang juga ditangkap sebagai bagian dari revisi RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2009-2029, sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang sangat optimal dan sinergis antara Kabupaten Sumenep dengan kabupaten lainnya di seluruh wilayah P. Madura.

2. Kebijakan pemberdayaan sektor informal daerah wilayah Suramadu;

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Suramadu (atau yang lebih terkenal dengan sebutan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), maka Tapak Jembatan Suramadu baik di sisi Kota Surabaya maupun Kabupaten Bangkalan menjadi kewenangan badan tersebut, sehingga kebijakan pemberdayaan sektor informal di lima wilayah Suramadu (Surabaya dan

Madura) lebih menghadang sisi area tertentu yang memperoleh pengaruh dari pembangunan Jembatan Suramadu.

- a. Kota Surabaya, secara umum program dan kegiatan sebagai implementasi kebijakan pemberdayaan sektor informal adalah pengembangan 13 (tiga belas) sentra-sentra PKL. Namunantisipasi secara tidak langsungnya terhadap pembangunan Jembatan Suramadu adalah 2 (dua) diantara 13 sentra tersebut berada di Kecamatan Bulak yang bersebelahan dengan Kecamatan Kenjeran yang merupakan tapak Jembatan Suramadu, yaitu Sentra PKL Tanah Merah dan Pasar Produk Hasil Laut Kyai Tambak Deres.
- b. Dalam mempersiapkan diri terhadap perkembangan ekonomi pasca pembangunan Jembatan Suramadu Kabupaten Bangkalan membenahi kondisi PKL di Kota Bangkalan dengan membangun Pusat Makanan Rakyat.
- c. Mengantisipasi perkembangan ekonomi pasca pembangunan Jembatan Suramadu Kabupaten Sampang lebih mempersiapkan diri membangun *mind set* usaha kecil menengah untuk berfikir secara profesional yang dilaksanakan dengan menempatkan Tenaga Konsultan Bisnis pada 14 kecamatan yang berlatar belakang pendidikan SL.

- d. Kabupaten Pamekasan lebih menekankan pada Pembangunan pasar tradisional serta penggantian tenda-tenda pedagang kaki lima di tengah kota, untuk mengantisipasi kunjungan masyarakat pasca pembangunan Jembatan Suramadu.
- e. Kabupaten Sumenep lebih menguatkan modal bagi sektor informal, sehingga mampu mengembangkan usahanya, di samping secara khusus menghadapi pasca pembangunan Jembatan Suramadu ini dengan memberikan secara gratis tenda-tenda baru *knock down* kepada pedagang kaki lima

3. Perkembangan sektor informal pada kawasan Jembatan Suramadu;

Sebelum menjelaskan masalah perkembangan sektor informal di Kawasan Jembatan Suramadu, perlu digambarkan bahwa responden penelitian yang 150 orang tersebut memiliki identitas yaitu: paling banyak berumur 36-40 tahun, agam terbanyak Islam, suku Madura lebih banyak dari Jawa, jenis kelamin laki-laki lebih dominan, pendidikan terbanyak SMA, status perkawinan terbanyak menikah, dan Asal daerah terbanyak Bangkalan.

Berkaitan dengan perubahan kondisi pekerja sebelum dan setelah pembangunan Jembatan Suramadu dapat dijelaskan bahwa: telah terjadi 32 macam perpindahan (perubahan pekerjaan); pekerjaan utama menjadi pekerjaan utama dan sampingan,

pekerjaan sampingan seluruhnya menjadi pekerjaan utama; pendapatan perbulan cenderung naik; terjadinya kenaikan jumlah responden yang merasa penghasilannya menjadi cukup; terjadi kenaikan keamanan dalam usahanya.

Berkaitan dengan kondisi eksisting usaha responden dapat dijelaskan bahwa: modal usaha harian responden terbanyak Rp. 100.000,- s/d Rp 400.000,-; menggunakan *modal sendiri* paling dominan dalam mengelola usahanya; lebih banyak yang merasa modal yang dimiliki *mencukupi* untuk mengelola usahanya; lebih banyak yang *tidak berkeinginan* menambah modalnya dalam waktu segera; lebih banyak yang *tidak berkeinginan* menambah modalnya dalam waktu jangka menengah (3 s/d 5 tahun); terbanyak status lahan usahanya adalah menggunakan *fasilitas umum*; lebih banyak yang merasa tempat usaha mereka *tidak layak*; lebih banyak yang *tidak berkeinginan* dilakukan perluasan dan perbaikan tempat usaha dalam waktu segera; bagi yang tempat usahanya layak, dalam jangka menengah lebih banyak yang *berkeinginan segera* dilakukan perluasan dan perbaikan tempat usaha; bagi yang usahanya berada di fasilitas umum, semuanya berkeinginan untuk pindah ke tempat yang legal; semua menyatakan bahwa pengembangan usaha menjadi prioritas; lebih banyak yang *memerlukan campur tangan pihak lain* dalam pengembangan usahanya;

Implikasi pembangunan Jembatan Suramadu bagi responden dapat dijelaskan sebagai berikut: semua responden merasa senang dengan dibangunnya jembatan; lebih banyak yang merasa usahanya lebih baik setelah dibangun jembatan; lebih banyak yang merasa *cocok* dengan usahanya yang sekarang; penataan tempat usaha yang diinginkan responden adalah: aman, tertib, mudah dijangkau, permanen, bersertifikat, dibangun tempat bermain, dibangun sentra PKL; keinginan bentuk bantuan adalah: modal usaha dan tempat usaha, bantuan modal tanpa jaminan dan tanpa bunga, pembinaan usaha; keinginan pengembangan wilayah usaha adalah: dibangun pasar tradisional, terminal, sentra PKL, Pujascra, sentra perdagangan modern, dan sentra pedagang Jembatan Suramadu; jika ada investor yang masuk wilayah tapak Jembatan Suramadu menurut mereka: berharap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, kebijakan pemerintah harus adil, kurang setuju sebaiknya masyarakat Madura yang patungan buka usaha.

4. Kondisi sosialisasi kebijakan penataan dan pengembangan sektor informal di kawasan Jembatan Suramadu.

Lebih banyak responden menyatakan tidak pernah dilakukan penertiban, dan bagi yang menyatakan pernah lebih banyak yang menganggap jarang dilakukan penertiban; seluruh responden menyatakan belum pernah dilakukan sosialisasi kebijakan

pemberdayaan sektor informal, sumber informasi yang responden inginkan jika dilakukan sosialisasi adalah pemerintah; materi kebijakan yang diinginkan dalam sosialisasi dengan urutan: pemberian pinjaman, penataan tempat, dan pembinaan usaha; media tatap muka diinginkan semua responden jika dilakukan sosialisasi; bahasa yang paling diinginkan dalam sosialisasi adalah bahasa Indonesia; khalayak (penerima) sosialisasi yang diinginkan adalah semua masyarakat; harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah dengan urutan: kemungkinan akses permodalan, perlindungan usaha, mengerti perizinan, dan akses pelatihan.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang ingin diusulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) seharusnya melibatkan Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan dalam mengembangkan sektor informal di Tapak Jembatan Suramadu, serta mempertimbangkan masukan dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura;
- Penataan sektor informal pada Tapak Jembatan Suramadu harus segera dibuat agar tidak menyulitkan pemerintah di kemudian hari, serta memberikan ketenangan, perlindungan dan kepastian berusaha bagi pengusaha sektor informal;

Pembinaan sektor informal perlu dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pelatihan pelayanan, serta pemberian wawasan untuk mengembangkan cara berfikir yang profesional mengingat Jembatan Suramadu bukan saja sebagai sarana penyeberangan, namun juga sebagai asset obyek wisata;

Aspek-aspek dalam komunikasi adalah Sumber Informasi-Isi Pesan-Media-Khalayak-Efek, sehingga strategi komunikasi yang disusun dalam melakukan sosialisasi kebijakan pemberdayaan sektor informal hendaknya memperhatikan aspek-aspek tersebut yang telah terjaring dalam penelitian ini.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang *Tata Ruang*,
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005
tentang *Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2004 - 2009*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo.
- Senjaya, Sasa Djuarsa. 1996. *Pengantar Komunikasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Gresik: Fascho Publishing.
- UU No. 24 Tahun 1992 tentang *Tata Ruang*
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 No. 104 - TLN No. 4421)*
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- UU No. 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*.